



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	4

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

LPj Pelaksanaan APBD Tahun 2021

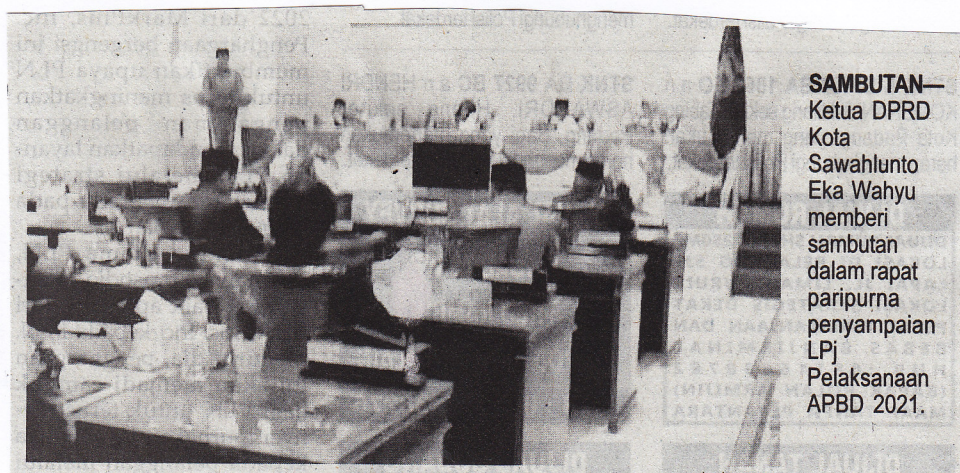
Tahun Depan, Pemko Diminta Pertahankan WTP

SAWAHLUNTO, METRO
Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu memimpin Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Nota Pengantar Walikota atas Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dilaksanakan, Rabu (22/6). Dalam rapat Paripurna tersebut, Eka wahyu menyampaikan, sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Ke-

uangan serta Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD Paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dan memenuhi ketentuan tersebut, Walikota Sawahlunto telah menyampaikan secara tertulis Ranperda dan Raperwako tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kepada DPRD dengan Surat nomor 900/276/DPPKAD/AKT/SWL-2022 tanggal 13 juni 2022, dan untuk pembahasan lengkap telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bersama p daerah.
Walikota Sawahlunto Deri Asta menyampaikan, dengan telah berakhirnya

pelaksanaan APBD 2021 pertanggal 31 Desember 2021. Maka sesuai dengan amanat UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah dan telah bergantinya tahun anggaran 2020 pada 31 Desember 2021 yang lalu. Maka kepala daerah wajib menyampaikan LK-PJ kepada DPRD, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keuangan kepada BPK.
Di mana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Provinsi Sumbar melalui pemeriksaan intern yang dilakukan pada 2 Februari hingga 23 Februari 2022, dan pemeriksaan lanjutan selama 30 hari .

Disampaikan, dalam penyerahan LHP terhadap LKPD tahun 2021 oleh BPK RI Sumbar, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021, perolehan ini merupakan ke 7 kalinya. Semuanya ini berkat kerjasama semua Stage Holder Sawahlunto dan tidak terlepas dari dukungan DPRD Sawahlunto. Untuk itu Pemko Sawahlunto mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Sawahlunto yang telah mendukung dan memberikan semangat.
"Sehingga meraih WTP tersebut, ke depannya mohon dukungan semua



SAMBUTAN—
Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu memberi sambutan dalam rapat paripurna penyampaian LPj Pelaksanaan APBD 2021.

pihak dalam menata ketausahaan keuangan daerah, agar Pemko Sawahlunto bisa mempertahankan WTP," ujar Deri Asta.
Walikota secara umum memaparkan gam-

baran realisasi pendapatan dan belanja selama tahun 2021, yang diawali dengan pendapatan daerah dan lain lainnya. Setelah selesai penyampaian Nota pengantar, Waliko-

ta Deri Asta juga telah menyerahkan nota pengantar walikota atas Ranperda tentang LPj Pelaksanaan APBD 2021 kepada pimpinan rapat DPRD Sawahlunto. (pin)

rinal/posmetro